

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 14 September 2024 Halaman: 3

PILKADA KOTA JOGJA

Tahapan Berpotensi Picu Kerawanan

KOTAGEDE-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja terus mengawasi setiap tahapan Pilkada 2024. Terlebih, berdasarkan hasil pemetaan, ada tiga tahapan yang paling rawan sepanjang tahapan resta demokrasi.

Wakil Koordinator SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Jogja, Siti Nurhayati, menyebut kota Jogia, Simkuriayat, inenyebut berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pilkada yang dilakukan Bawaslu RI, ada tiga tahapan utama yang paling rawan sepanjang tahapan pelaksanaan pilkada. "Ketiganya adalah tahapan pencalonan, Tiga tahapan yang dinilai rawan yakni pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Adanya tiga bakal pasangan calon yang bertarung di Kota Jogja membuat basis massa menyebar.

kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara," kata Nurhayati saat dikonfirmasi, Jumat (13/9).

Menurut Nurhayati, sejatinya Kota Jogja tak masuk dalam daerah rawan. Namun, secara umum untuk DIY, Kota Jogja termasuk daerah dengan potensi

erawanan sedang. Bawaslu Kota Jogja hingga kini terus berkoordinasi dan bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan. Mereka

didorong untuk bersama sama mengawal tahapan pilkada dengan pengawasan partisipatif

Di sisi lain, Bawaslu juga menegaskan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN), "Kami sosialisasi secara

masif tentang netralitas ASN, diikuti dengan deklarasi netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas. Selain itu, Bawaslu Kota juga mengeluarkan imbauan terkait dengan netralitas demi memastikan Pilkada 2024 berjalan aman damai dan berintegritas," katanya.

Di tahap kampanye, Nurhayati mengajak

masyarakat untuk menggencarkan gerakan antipolitik uang, Menurutnya, ini menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama dan sudah ada regulasi yang mengatur.

Dia menegaskan tahapan MENUJU pilkada akan berbeda dengan tahapan pemilu.

7 NOVEMBER "Pada tahapan pilkada, 27 NOVEMBER 272024

baik yang memberi atau yang menerima [politik uang] bisa dikenai sanksi pidana," katanya.

Sedangkan untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan partisipatif. Demi mempermudah akses masyarakat dalam pengawasan tersebut. Bawaslu Kota Jogja memiliki sistem informasi Aduan Masyarakat Online atau Admo. Aplikasi ini diharapkan dapat memperinudah masyarakat menyampaikan aduan atau laporan terkait dengan pelanggaran yang ditemukan di wilayah masing-masing.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Nindyo Dewanto, menuturkan jajarannya mengerahkan tim pemantauan situasi politik di masingmasing wilayah. Berdasarkan laporan dinamika politik di tingkat bawah, Nindyo memastikan suasana di Kota

Jogja masih cenderung landai. Adanya tiga bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja yang bertarung membuat basis massa menvebar.

Artinya, bakal pasangan calon tidak akan bertanding secara head to head, akan bertanding secara nead to nead, dan ini akan memecah massa serta menekan terjadinya gesekan antar-pendukung. "Sampai saat ini kondisi di Jogja masih aman. Sebenarnya tidak ada kerawanan di Kota Jogja, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan," kata Nindyo.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005